

# **Lampiran 8b**

## **Rencana Aksi Gender**

Untuk Proposal Pendanaan/ Funding Proposal

Mitigasi dan Adaptasi berbasis Lahan melalui Pendekatan Yurisdiksi di  
Kalimantan Barat

*Land-based Mitigation and Adaptation through a Jurisdictional Approach in  
West-Kalimantan*

23/07/2024

Versi 3.0

Disampaikan oleh :

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

# 1. Latar Belakang dan Pendahuluan

Rencana Aksi Gender (Gender Action Plan/GAP) ini ditujukan untuk proyek Green Climate Fund (GCF) “Mitigasi dan Adaptasi Berbasis Lahan melalui Pendekatan Yurisdiksi di Kalimantan Barat”. Dokumen ini menjadi dasar untuk mengoperasionalkan hasil dan rekomendasi dari Penilaian Gender (Gender Assesment, lihat Lampiran 8a). Dokumen ini berisi elemen-elemen spesifik terkait gender yang harus dipertimbangkan dalam desain proyek dan selama pelaksanaan kegiatan.

Dokumen ini membantu proyek GCF untuk memajukan kesetaraan gender melalui aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan meminimalkan risiko sosial, gender, dan risiko terkait iklim dalam semua kegiatannya. Selain itu, GAP juga membantu memantau pelaksanaan tindakan dan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, GAP memastikan pengarusutamaan gender yang efektif dan integrasi perspektif gender yang konsisten untuk memaksimalkan manfaat bersama pada iklim dan pembangunan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendorong perubahan dan dinamika gender yang positif serta mengelola dan memitigasi potensi risiko yang merugikan selama proyek berlangsung.

## 2. Rencana Aksi Gender

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
<b>Cross-cutting actions</b>								
1.	Lintas Sektoral	Merekrut seorang ahli gender (ESGI Advi-sor) untuk memberikan dukungan teknis guna memastikan partisipasi perempuan dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan mengarusutamakan gender di seluruh kegiatan proyek.	Satu ahli gender (Penasihat ESGI) direkrut kembali pada Tahun ke-1 implementasi proyek.	0	Satu orang ahli gender dipekerjakan untuk seluruh siklus proyek pada tahun pertama pelaksanaan proyek.	Y:1 – Y:7	GIZ	210,000
2.	Lintas Sektoral	Membangun sistem M&E yang responsif gender yang mencakup semua indikator GAP.	Sistem M&E yang responsif gender adalah beroperasi.	0	Sistem pemantauan proyek adalah sistem operasional yang dapat mengumpulkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, etnis, disabilitas, dan lokasi geografis.	Y:2-7	Penasihat Teknis GIZ untuk Perlindungan Lingkungan dan Sosial, Gender, dan Masyarakat Adat (Penasehat ESGI)	termasuk dalam anggaran M&E

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
3.	Lintas Sektoral	Mengembangkan Kode Etik yang melarang SEAH oleh staf proyek dan mitra pelaksana, termasuk pelatihan-pelatihan.	<p>i) Kode Etik SEAH tersedia.</p> <p>ii) Persentase staf yang telah meninjau dan menandatangani kode etik.</p> <p>iii) Persentase staf yang telah dilatih mengenai kode etik dan GRM, termasuk protokol SEAH.</p>	0	<p>i) Kode etik khusus proyek yang berkaitan dengan eksistensi SEAH.</p> <p>ii) 100%</p> <p>iii) 100%</p>	<p>i) Y:1</p> <p>ii) Y:1-7</p> <p>iii) Y:1-7</p>	Penasehat ESGI	<p>Termasuk dalam anggaran untuk pengukuran GAP #1</p> <p>5,000</p>
4.	Lintas Sektoral	Mekanisme GRM, dengan protokol tentang Eksploitasi, Penyalahgunaan dan Pelecehan Seksual (SEAH) dikembangkan, dan data SEAH disertakan dalam pemantauan dan pelaporan.	<p>i) Semua laporan tahunan yang menyertakan data SEAH inci-dent dalam proyek disertakan dalam pelaporan ulang proyek di Y1-7.</p> <p>ii) Jumlah</p>	0	i) Yes	Y: 1-7	Penasehat ESGI	termasuk dalam anggaran M&E

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
			insiden SEAH yang dilaporkan dan diiklankan <sup>1</sup>		ii) Meskipun targetnya adalah 0, tujuannya adalah agar setiap insiden yang terjadi dilaporkan kembali dan diselesaikan melalui protokol SEAH mekanisme GRM <sup>2</sup>			
5.	Lintas Sektoral	Kampanye peningkatan kesadaran SEAH dilakukan.	Jumlah kampanye kesadaran SEAH yang dilakukan	0	7 kampanye kesadaran SEAH dilakukan (1 kali per tahun)	Y: 1-7	Penasehat ESGI GIZ Solidaridad BPD LH	10,000
6.	Lintas Sektoral	Dukungan rekan sejawat dalam isu-isu terkait SEAH dibangun dan didukung dengan pembangunan kapasitas dan hubungan.	lompong dukungan sebaya di SEAH yang dibentuk dan dilatih pada Y2-5.ii) Jumlah laki-laki dan perempuan (berdasarkan jenis kelamin) yang mengakses jaringan penyelamatan atau kelompok dukungan	0	i) Setidaknya satu jaringan penyintas atau kelompok pendukung tentang SEAH dibentuk dan memberikan pelatihan. ii) Jumlah peserta yang hadir (dipilah berdasarkan jenis kelamin)	Y: 2-5	GIZ	Termasuk dalam anggaran untuk pengukuran GAP #4

<sup>1</sup> The project will oversee the follow-up of reported cases, ensuring all records are stored confidentially and securely. Monitoring efforts will involve collecting data on the number of cases reported, which will be included in annual reports. Additional information is included in the ESIA (Annex 6a) and ESMP (Annex 6b).

<sup>2</sup> More detailed information on the GRM, and its SEAH-specific protocol, is provided in the ESMP (Annex 6b).

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
			sebayu (sambil memastikan bahwa anonimitas mereka terjamin)					
7.	Lintas Sektoral	Peningkatan kapasitas dalam proses PADIATAPA, mekanisme pengaduan, topik-topik yang berkaitan dengan gender (termasuk penganggaran gender, PPRG) dan kapasitas untuk memfasilitasi refleksi kritis dalam pelaksanaan proyek bagi fasilitator lapangan, staf proyek GIZ, dan tenaga pendamping independen (bersama dengan pelatihan IPP-FPIC). <sup>3</sup>	i) Jumlah Pelatihan  ii) Jumlah staf yang dilatih	0	i) Total 14 pelatihan yang diselenggarakan, 2 pelatihan untuk staf pro-proyek, 2 pelatihan untuk staf mitra di tingkat provinsi, dan 10 pelatihan untuk staf mitra di tingkat kabupaten ii) 100%	Y1 dan Y3/berdasarkan permintaan (staf baru)	Penasehat ESGI  Pokja <sup>4</sup> REDD+  Pokja Pengarusutamaan Gender  Universitas Tanjungpura sebagai akademisi yang ditunjuk untuk membantu secara teknis	20,000 (termasuk dalam anggaran pelatihan untuk tindakan. 1.1.1, lihat juga IPP)

<sup>3</sup> For all trainings, efforts will be made to overcome barriers to participate in meetings. This includes: planning trainings in community spaces and/or accessible venues that are convenient for women, ensuring inclusive/flexible scheduling at times that are convenient for women, considering their domestic responsibilities, and ensuring effective and clear communication. Active gender-responsive monitoring and target setting will also help the team adaptively manage as needed to ensure women are effectively participating.

<sup>4</sup> Pokja = working group / taskforce

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
8.	Lintas Sektor	Memperkenalkan kuota untuk partisipasi perempuan dalam kegiatan proyek yang relevan dan staf teknis (dari semua mitra) yang terlibat dalam proyek. Tindakan serupa dengan sel di atas akan diimplementasikan untuk membantu meningkatkan partisipasi perempuan.	% peserta perempuan  % staf teknis	Tingkat wanita sering kali di bawah 30%.	Minimal 30% perempuan	Y: 1-7	Penasehat ESGI  GIZ Solidaridad BPD LH	Termasuk dalam anggaran untuk ukuran GAP #1 dan perjanjian hibah dengan EE
9.	Lintas sektoral; dalam aktivitas tertentu: 3.2.1	Tata kelola sumber daya hutan yang adil dan efektif di KUPS	Persentase perempuan dalam kepanitiaan KUPS meningkat	Tingkat wanita seringkali di bawah 15%.	Setidaknya 30% dari anggota komite adalah perempuan	Y: 1-7	GIZ	Termasuk dalam anggaran M&E
10.	Lintas sektoral; khususnya sub-kegiatan: 1.1.1.2 1.1.2.3 3.1.1.3 3.2.1.3	Mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender ke dalam pelatihan untuk para pemangku kepentingan yang relevan, khususnya untuk Tanjungpura. Universitas, KPH, fasilitator lapangan Perhutanan sosial.	% materi pelatihan yang ditinjau ulang oleh spesialis gender untuk memastikan pengarusutamaan gender yang memadai	0	100% materi pelatihan yang dibahas	Y: 1-7	Penasehat ESGI	Termasuk dalam anggaran untuk pengukuran GAP #1

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
11.	Lintas Sektoral	Membagikan kegiatan dan hasil proyek di situs web Pengarusutamaan Gender KLHK ( <a href="https://pug.sisibaik.id/">https://pug.sisibaik.id/</a> ). Tim juga akan membagikan informasi terbaru melalui pelatihan tatap muka dan membagikan materi cetak jika diperlukan. <sup>5</sup>	Jumlah praktik-praktik yang baik, panduan, dan pembelajaran yang tersedia di situs web  Laporan mengenai pelibatan pemangku kepentingan dan implementasi rencana pelibatan pemangku kepentingan.	0	Minimal 5 produk media tentang pengarusutamaan gender tersedia.	Y: 1-7	Penasehat ESGI	15,000
12.	Lintas Sektoral	Berkolaborasi dengan kelompok-kelompok perempuan dan organisasi perempuan yang aktif di Kalimantan Barat untuk mendukung pengarusutamaan gender berdasarkan kebutuhan	Jumlah Nota Kesepahaman dengan kelompok perempuan atau organisasi	0	Minimal satu MoU/kontrak dengan kelompok perempuan atau organisasi perempuan telah ditandatangani oleh proyek	Y: 1-7	Penasehat ESGI	Termasuk dalam anggaran untuk pengukuran GAP #1

<sup>5</sup> Relevant information will be disclosed in a language and forms accessible to target communities and the wider public. Communities will retain the right to ask for information about the project's status, entitlements, eligibility criteria, benefits allocation, responsibilities, and Grievance Redress Mechanism (GRM) channels, which will be made accessible. For more detailed information, refer to the Stakeholder Engagement Plan in Annex 7a,



ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
		yang telah diidentifikasi (misal: Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Bor-neo; Gemawan; Dian Tama; Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA))	perempuan <sup>6</sup>					
<b>Component 1</b>								
13.	<b>Sub Kegiatan 1.1.1.1:</b> Mengembangkan kebijakan adaptasi di tingkat provinsi sejalan dengan kebijakan adaptasi nasional	Mengintegrasikan pengarusutamaan gender kedalam RAP <sup>7</sup> , API <sup>8</sup> and RAK <sup>9</sup> API dengan dukungan spesialis gender .	Jumlah RAP API dan RAK API yang berperspektif gender.	0	1 RAP API and 5 RAK API yang berperspektif gender	Y: 3-7	Penasehat ESGI BAPPEDA <sup>10</sup> Pokja <sup>11</sup> REDD+ Pokja Pengarusutamaan Gender	20,000 Konsultan lokal + 20,000 Lokakarya/pertemuan (keduanya termasuk dalam kegiatan. Anggaran untuk

<sup>6</sup> The Project's ESGI Specialist will also explore opportunities with government organizations and civil society organizations who work on SEAH, and will identify if there are synergies to share information on not only the SEAH-related measures in the project (e.g. GRM), but also share information on available resources and services from these organizations. For example, the following organizations work on this topic and will be approached: will be approached:

- Jumalis Perempuan Khatulistiwa that provides assistance to women including issue of justice and violence (puankhatulistiwa.com)
- LBH APIK (Asosiasi Perempuan untuk Keadilan) – Women association for justice, who provides assistance, defense and legal aid for women who experience GBV, discrimination and SEAH, and develop the capacities of communities to open access to justice for women, the poor and victims of human rights violations. They are a national organization, however have an office in WK Province (<https://lbhapik.or.id/>)
- Other womens organizations the ESGI specialist will potentially conduct outreach with include: Yayasan Dian Tama, Lembaga Gemawan, PPSW Borneo, PEKKA.

<sup>7</sup> RAP (Rencana Aksi Provinsi): Provincial Action Plan

<sup>8</sup> API (Adaptasi Perubahan Iklim): Climate Change Adaptation

<sup>9</sup> RAK (Rencana Aksi Kabupaten): Regency Action Plan

<sup>10</sup> BAPPEDA = Provincial planning agency

<sup>11</sup> Pokja = working group / taskforce

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
								1.1.1)
14.	<b>Sub Kegiatan 1.1.1.3</b> Pengembangan alat bantu untuk mengimplementasikan kegiatan adaptasi	Mengembangkan materi panduan Pengarusutamaan Gender dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk KLHK/DLHK: - standar operasional (SOP) - ringkasan kebijakan dan praktik-praktik terbaik di tingkat daerah.	Tersedia materi panduan Pengarusutamaan Gender.	0	Ya - materi panduan pengarusutamaan gender disiapkan dan tersedia untuk mitra.	Y: 2-6	Penasehat ESGI	15,000 Konsultan lokal (Termasuk dalam anggaran kegiatan 1.1.1)
15.	<b>Sub Kegiatan 1.1.1.4 1.1.2.4.</b> Pemantauan dan pelaporan kegiatan adaptasi dan mitigasi	Mengintegrasikan data terpilah berdasarkan gender ke dalam sistem pemantauan dan pelaporan adaptasi dan mitigasi.	Sistem pemantauan adaptasi menampilkan data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin.	0	Sistem pemantauan adaptasi dan platform online mengintegrasikan data terpilah menurut jenis kelamin.	Y: 2-7	Penasehat ESGI dengan dukungan dari :: - Bappenas and Bappeda  - Dinas Peberdayaan Peempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) di provinsi dan kabupaten  - Dinas Lingkungan	Termasuk dalam anggaran untuk pengukuran GAP #1

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
							Hidup dan Kehutanan diprovinsi/ Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten	
16.	<b>Sub Kegiatan 1.1.2.1</b> Menyelaraskan kebijakan REDD+ provinsi dengan kebijakan dan peraturan mitigasi nasional.	<p>i) Meninjau kerangka kerja regulasi yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender di tingkat provinsi, terutama dalam kaitannya dengan mitigasi .</p> <p>ii) Memperkuat kerangka kerja regulasi yang terkait dengan mitigasi dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dengan dukungan spesialis gender.</p>	kebijakan mitigasi yang responsif gender	<p>Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki Rencana Aksi Daerah untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) tetapi belum mengintegrasikan gender.</p> <p>Pemerintah provinsi Kalimantan Barat memiliki Strategi</p>	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki RAD-GRK, SRAP, dan ERIS yang responsif gender.	Y: 1-2	<p>Penasehat ESGI dengan dukungan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan (DLHK) in province and Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten</li> <li>- Bappeda di Provinsi and Kabupaten</li> <li>-Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA)</li> </ul>	30,000 Konsultan lokal (sudah termasuk dalam anggaran untuk kegiatan 1.1.2)

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
				<p>dan Rencana Aksi Provinsi tentang REDD+ (SRAP) tetapi belum mengintegrasikan gender.</p> <p>Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki Strategi Intervensi Pengurangan Emisi (ERIS), tetapi belum responsif gender</p>			<p>di provinsi dan kabupaten</p> <p>-UNTAN atau universitas lainnya yang dapat memberikan masukan terkait hal teknis terkait kesetaraan gender</p>	
17.	<b>Sub Kegiatan 1.1.2.2</b> inklusi kebijakan mitigasi dalam rencana pembangunan provinsi	Menyediakan tenaga ahli untuk mengintegrasikan gender ke dalam rencana pembangunan daerah/provinsi (RPJMD), terutama	Dokumen RPJMD yang responsif gender untuk Provinsi Kalimantan Barat telah tersedia.	0	RPJMD Kalimantan Barat mengintegrasikan gender dalam target mitigasi, program, dan kegiatan.	Y: 2-3	Penasehat ESGI dengan dukungan: Bappeda di Provinsi dan kabupaten	25,000 Konsultan lokal (sudah termasuk dalam anggaran untuk kegiatan 1.1.2)

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
		dalam program-program mitigasi, dengan dukungan spesialis gender .						
18.	<b>Sub kegiatan 1.2.1.3</b> Meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan (yaitu perusahaan, masyarakat, pemerintah provinsi dan kabupaten) dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan Karbon di dalam kawasan non-hutan negara	Meningkatkan kesadaran gender dalam kelompok kerja NKT/SKT melalui pelatihan dan kampanye serta mengembangkan SOP dan kerangka kerja perlindungan untuk responsif gender dalam rencana pengelolaan NKT/SKT.	ersentase pelatihan yang responsif gender	0	100% pelatihan untuk para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan NKT/SKT (yaitu perusahaan, masyarakat, pemerintah provinsi dan kabupaten) dan SOP untuk rencana pengelolaan NKT/SKT yang responsif gender.	Y: 3-6	Penasehat ESGI GIZ	30,000 Konsultasi lokal + 30.000 Pelatihan (keduanya termasuk dalam anggaran Perjanjian Pembiayaan untuk LSM keanekaragaman hayati)
19.	<b>Sub-kegiatan 1.2.1.4</b> Mendukung dan memantau implementasi rencana pengelolaan untuk Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati dan	Mengintegrasikan pelaporan mengenai pengukuran gender dalam laporan NKT/SKT	Keterwakilan gender merupakan bagian dari laporan NKT/SKT	Tidak ada laporan NKT/SKT yang tersedia	Laporan NKT/SKT yang didukung oleh proyek ini mencakup aspek-aspek responsif gender.	Y: 2-4	Penasehat ESGI Penasehat M&E	Termasuk dalam anggaran untuk pengukuran GAP #1

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
	Karbon Tinggi							
20.	<b>Sub-Kegiatan 1.2.1.5</b> Memungkinkan sertifikasi Pendekatan Yurisdiksi (JA) untuk Kabupaten (Ketapang) sebagai model yang dapat direplikasi ke kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Barat	Proses konsultasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan bersifat responsif terhadap perkembangan zaman	i) Persentase perempuan yang dikonsultasikan (dalam %)  ii) Pelaporan pelaksanaan rencana pelibatan pemangku kepentingan yang mencerminkan umpan balik dari perempuan dan organisasi perempuan.	0	i) Setidaknya 30% dari pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi adalah perempuan  ii) Ya	i) Y: 3-6  ii) Y: 1-7	Penasehat ESGI GIZ  Pemerintah Provinsi dan Kabupaten (aktor utama)	Termasuk dalam anggaran untuk ukuran GAP #1
21.	<b>Sub-kegiatan 1.3.1.1</b> Melaksanakan program hibah yang berfokus pada Masyarakat Adat di Kalimantan Barat	i) Meningkatkan kesadaran perempuan tentang program hibah	i) Melaksanakan kampanye penjangkauan dan penyadaran yang ditargetkan untuk memastikan bahwa perempuan mendapat in-	0	i) 6 kampanye	Y: 2-6	Penasehat ESGI GIZ Komite seleksi proposal dana IP BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP (BPD LH)	6,000

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
		ii) Increasing women's access to IP funding mechanism as recipients of grants	<p>formasi tentang ketersediaan hibah dan proses pengajuan permohonan (misalnya, melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk pertemuan masyarakat, siaran radio, dan jaringan perempuan)</p> <p>ii) Kriteria seleksi yang ditetapkan mencakup ketanggapan gender pada intinya .</p> <p>iii) Spesialis ESGI yang akan terlibat dalam peninjauan dan pemantauan, dan tersedia</p>		<p>ii) 100% proposal yang disetujui memenuhi kriteria seleksi yang responsif gender</p> <p>iii) Ya</p>			

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
			untuk memberikan panduan dalam implementasi					
22.	<b>Sub-kegiatan 1.3.1.2</b> Menguraikan strategi, kebijakan, dan prosedur untuk satu atau beberapa mekanisme pembiayaan untuk pertanian dan kehutanan yang berketahanan iklim	Mengintegrasikan perspektif gender dalam strategi kebijakan dan prosedur yang terkait dengan mekanisme pendanaan untuk perubahan iklim	Kebijakan dan strategi yang diuraikan mencerminkan perspektif gender	0	Semua kebijakan, strategi, dan prosedur mencerminkan perspektif gender.	Y: 2-7	Penasehat ESGI GIZ Pemerintah Provinsi	50,000 Konsultan Lokal (termasuk dalam anggaran untuk kegiatan 1.3.1)
<b>Komponen 2</b>								
23.	<b>Sub-kegiatan 2.1.1.1</b> Merancang model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan.	Memastikan bahwa model bisnis yang dikembangkan responsif gender dan memperkuat situasi ekonomi perempuan	Tersedia model bisnis yang responsif gender	0	Model bisnis yang dikembangkan dalam pemanfaatan hutan dan lahan yang berkelanjutan adalah responsif gender	Y: 4-7	1. GIZ 2. Penasehat ESGI	20,000 Konsultan Lokal (termasuk dalam anggaran untuk kegiatan 2.1.1)
24.	<b>Sub-kegiatan 2.1.2.1</b> Peningkatan kapasitas untuk menerapkan pertanian petani kecil yang tangguh dan	i) Memberikan pelatihan di tingkat rumah tangga untuk mengidentifikasi isu-isu gender di masyarakat dan mendukung kepekaan gender	i) Persentase (dalam %) rumah tangga yang berpartisipasi dalam pelatihan	0  0	i) 30% peserta pelatihan adalah perempuan	Y: 1-6	Solidaridad PenasehatESGI Dinas Perkebunan	40,000 (Termasuk dalam anggaran perjanjian pembiayaan dengan EE Solidaridad)



ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
	berkelanjutan	<p>bagi laki-laki dan perempuan.</p> <p>ii) Meningkatkan kesadaran gender di kalangan penyuluh pertanian dan petani champion.</p> <p>iii) Memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada Kelompok Wanita Tani dalam bidang pertanian cerdas iklim.</p>	<p>gender di desa-desa sasaran .</p> <p>ii) Persentase (dalam %) penyuluh/pejuang lokal yang menerima pelatihan kesadaran gender.</p> <p>iii) Persentase perempuan yang dilatih dalam pertanian cerdas iklim</p>		<p>ii) 100% dari mantan petugas pertanian/petani champion telah menerima pelatihan kesadaran gender.</p> <p>iii) 30% dari petani yang dilatih adalah perempuan.</p>			
25.	<p><b>Sub-kegiatan 2.1.2.2</b></p> <p>Komoditas dan wanatani yang tahan iklim dan berskala besar dengan akses pasar yang belum teruji</p>	<p>i) Memberikan bantuan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan petani perempuan untuk mendapatkan pendaftaran STDB.</p> <p>ii) Memberikan pendampingan teknis terkait usaha</p>	<p>i) Persentase petani yang menerima pendaftaran STDB adalah perempuan.</p> <p>ii) Persentase petani perempuan</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>i) 30% dari semua petani yang terdaftar di bawah STDB adalah perempuan</p> <p>ii) 50% UMKM yang dipimpin perempuan/petani perempuan mengkonfirmasi adanya</p>	Y: 2-6	<p>Solidaridad</p> <p>Dinas Perkebunan</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Dinas Koperasi dan UMKM</p>	<p>10,000 termasuk dalam anggaran untuk ukuran GAP #24</p>

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
		agroforestri, termasuk pemasaran dan pengolahan hasil agroforestri bagi UMKM/petani perempuan	dengan peningkatan akses ke pasar dan pendapatan		peningkatan akses ke pasar dan pendapatan.			
26.	<b>Sub-kegiatan 2.1.2.3</b> istem digital untuk penelusuran dan sertifikasi rantai nilai, serta peningkatan akses ke layanan	i) Memastikan bahwa sistem penelusuran yang baru bersifat inklusif gender dengan menyelenggarakan pertemuan umpan balik & evaluasi tahunan  ii) Menyediakan pelatihan bagi perempuan untuk menggunakan sistem digital.	i) Persentase perempuan yang mengonfirmasi inklusivitas gender dalam sistem digital melalui partisipasi dalam rapat umpan balik dan evaluasi  ii) Persentase perempuan yang dilatih dalam penggunaan sistem.	Tidak ada sistem/pertemuan yang tersedia	i) Sebagian besar petani kecil perempuan (>50%) mengonfirmasi kemudahan penggunaan sistem digital dalam 5 pertemuan umpan balik dan evaluasi.  ii) 30% dari petani kecil yang dilatih adalah perempuan.	Y: 2-6	Solidaridad	20,000
27.	<b>Sub-kegiatan 2.1.3.1:</b> Membentuk platform berbasis komoditas di	Memastikan keterwakilan petani perempuan dalam setiap forum.	Jumlah MSF dengan keterwakilan	0	100% MSF termasuk peserta perempuan	Y: 1-5	Solidaridad  Bappeda	Termasuk dalam anggaran untuk

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
	tingkat kabupaten dan terlibat dengan MSP provinsi, nasional dan internasional untuk mempromosikan dialog mengenai praktik kehutanan dan pertanian yang berkelanjutan, investasi ke dalam rantai pasokan yang berkelanjutan, dan praktik-praktik pengadaan yang berkelanjutan		petani perempuan.				Sekda provinsi	pengukuran GAP #1
28.	<b>Sub-kegiatan 2.1.4.1</b> GRASS - Menghijaukan Rantai Pasokan Petani Kecil di Kapuas Hulu	Memampukan perempuan melalui langkah-langkah pelatihan khusus untuk mewujudkan potensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan produksi pangan.	Jumlah perempuan yang dilatih dalam produksi pangan dan komoditas berkelanjutan	0	180	Y: 1	Penasehat ESGI	100,000 Pelatihan (termasuk dalam anggaran pelatihan-workshop untuk kegiatan 2.1.4)

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
	<b>Sub-kegiatan:</b> <b>2.1.5.1</b> NISCOPS II	Mengadvokasi inklusivitas gender dalam proses revisi ISPO.	Rencana advokasi untuk Inklusi gender dalam ISPO	0	Analisis gender dan rencana advokasi diuraikan	Y: 2-6	Solidaridad Indonesia	50,000
<b>Komponen 3</b>								
29.	<b>Sub-kegiatan</b> <b>3.1.1.1</b> Pengembangan rencana pengelolaan KPH yang berwawasan iklim	Memasukkan langkah-langkah Pengarusutamaan Gender dalam template untuk RPHJP/RPHJpd	Persentase RPHJP/RPH JPd baru yang menyertakan ukuran gender	Untuk dianalisis sebelum pelaksanaan tindakan.	100%	Y: 1-7	Penasehat ESGI Pokja Pengarusutamaan Gender	50,000 Konsultasi Lokal (termasuk dalam kegiatan 3.1.1)
30.	<b>Sub-kegiatan</b> <b>3.1.1.2</b> Mendukung Organisasi KPH di lima Kabupaten target untuk mendapatkan status “Organisasi KPH Efektif”	Mendukung kelompok-kelompok tani hutan yang diutamakan yang berperspektif gender (perhutanan sosial) untuk mencapai status “KPH Efektif”	Jumlah kelompok tani hutan yang mempertimbangan pengarusutamaan gender (misalnya menjadi kelompok tani perempuan atau memiliki keseimbangan gender dalam kelompok).	0	100%	Y: 1-7	Penasehat ESGI Pokja Pengarusutamaan Gender	200,000 Konsultasi Lokal (termasuk dalam kegiatan 3.1.1)

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
31.	<b>Sub-kegiatan 3.1.1.4</b> Mendukung organisasi KPH di lima kabupaten target dalam mengimplementasikan RPHJP dan RPHJPd yang berwawasan iklim melalui pengembangan sistem informasi dan peningkatan praktik-praktik pengelolaan hutan	Mengintegrasikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin ke dalam sistem pertukaran data dan informasi (misalnya Matriks Analisis Gender (GAM) dan menggunakan Kerangka Kerja Analisis Kapasitas dan Kerentanan (CVA)	Tersedianya data dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam sistem pertukaran data dan informasi	Tidak ada sistem pertukaran data dan informasi yang beroperasi	Data terpilah berdasarkan jenis kelamin diintegrasikan ke dalam sistem perubahan data dan informasi.	Y: 1-7	Penasehat ESGI Pokja Pengarusutamaan Gender	Termasuk dalam anggaran untuk pengukuran GAP #1
32.	<b>Sub-kegiatan 3.2.1.1</b> Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan PS dan mendukung proposal izin PS baru	i) Memastikan keterwakilan perempuan dalam kelompok-kelompok Perhutanan Sosial yang didukung oleh kegiatan ini.  ii) Mendukung Pengarusutamaan Gender sebagai bagian dari dukungan kepada kelompok petani hutan (perhutanan sosial)	Keterwakilan perempuan di antara 70 kelompok Perhutanan Sosial yang didukung.	Saat ini, perempuan kurang terwakili dalam kelompok-kelompok PS.	Sedikitnya 20% perempuan berpartisipasi dalam kelompok perhutanan sosial .	Y: 1-7	Penasehat ESGI Pokja Pengarusutamaan Gender	Termasuk dalam anggaran untuk pengukuran GAP #1

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
33.	<p><b>Sub-kegiatan 3.2.1.2</b></p> <p>Mengembangkan dan memperkuat unit-unit usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk membangun, meningkatkan, dan meningkatkan pasar, rantai pasok, dan nilai tambah produk masyarakat, termasuk penciptaan model-model KUPS dan dukungan permodalan.</p>	<p>i) Memberikan pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk KUPS.</p> <p>ii) Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi perempuan yang terlibat aktif dalam KUPS maupun yang belum terlibat dalam KUPS.</p> <p>iii) Memberikan dukungan kepada kelompok perempuan yang sudah ada atau membentuk kelompok/subkelompok baru untuk meningkatkan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan, tata kelola, dan</p>	<p>i) Persentase KUPS dengan rencana bisnis dan anggaran yang responsif gender</p> <p>ii) Persentase perempuan sebagai anggota pengurus KUPS</p> <p>iii) Jumlah kelompok perempuan yang didukung oleh proyek</p>	<p>Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender tidak dipraktikkan; perempuan di KUPS kurang terwakili.</p>	<p>i) 100% dari KUPS yang didukung memiliki rencana bisnis dan anggaran yang responsif gender.</p> <p>ii) 100% KUPS memiliki keterwakilan perempuan di tingkat manajemen.</p> <p>iii) Setidaknya satu kelompok perempuan didukung di setiap desa .</p>	Y: 1-7	Penasehat ESGI Pokja Pengarusutamaan Gender	30,000 Konsultasi Lokal (termasuk dalam kegiatan. 3.2.1)

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
		partisipasi masyarakat.						
34.	<b>Sub-kegiatan 3.2.1.3</b> Peningkatan kapasitas untuk pemegang izin PS dan skema PHBM legal lainnya	Memastikan keterwakilan perempuan yang sesuai dalam pelatihan fasilitator lapangan (ToF) PS.	% fasilitator dan pelatih perempuan yang berpartisipasi dalam pelatihan .	Perempuan sebagai fasilitator dan pelatih PS masih kurang terwakili.	50% dari slot pelatihan di berbagai tingkatan dicadangkan untuk fasilitator dan pelatih perempuan.	Y: 1-7	Penasehat ESGI Pokja Pengerusutamaan Gender	Termasuk dalam anggaran untuk pengukuran GAP #1
35.	<b>Sub-kegiatan 3.2.1.4</b> Restorasi dan rehabilitasi ekosistem hutan bakau dan hutan gambut	Mendorong partisipasi perempuan dari masyarakat dalam restorasi gambut dan hutan tanaman industri serta dalam pendirian pembibitan pohon.	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan restorasi.	Tidak ada informasi mengenai partisipasi perempuan dalam kegiatan restorasi.	30% .	Y: 1-7	Penasehat ESGI Pokja Pengerusutamaan Gender	20,000 ( termasuk dalam Perjanjian Pembiayaan dengan LSM Keanekaragaman Hayati )
36.	<b>Sub-kegiatan 3.2.1.5</b> Mengembangkan infrastruktur akuakultur yang tahan terhadap perubahan iklim untuk masyarakat pesisir	Pembentukan kelompok-kelompok akuakultur yang dipimpin oleh perempuan.	Jumlah kelompok akuakultur baru yang dipimpin oleh perempuan.	0 kelompok akuakultur yang dipimpin perempuan	Setidaknya satu kelompok akuakultur yang dipimpin oleh perempuan (proyek ini akan membentuk dua kelompok di dua kabupaten)	Y: 1-7	Penasehat ESGI Pokja Pengerusutamaan Gender	20,000 ( termasuk dalam Perjanjian Pembiayaan dengan LSM Keanekaragaman Hayati )
37.	<b>Sub-kegiatan 3.2.1.6</b> Mempercepat dan	Memastikan keterwakilan di antara kelompok-	Jumlah perempuan sebagai	Perempuan dalam PHBM	100%	Y: 1-7	Penasehat ESGI	Termasuk dalam anggaran

ID	Kegiatan proyek	Langkah-langkah untuk memperkuat kesetaraan gender	Indikator	Baseline	Target, termasuk target yang dipilah berdasarkan jenis kelamin	Waktu	Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya (EUR)
	memungkinkan akses terhadap aliran dana potensial untuk mitigasi perubahan iklim (mis. REDD+) dan strategi adaptasi .	kelompok PS yang didukung untuk meningkatkan akses keuangan.	anggota dewan pengurus PS/ PHBM	kurang terwakili dan kurang memiliki akses terhadap mekanisme pendanaan .			Pokja Pengarusutamaan Gender	untuk ukuran GAP #1
38.	<b>Sub-activity 3.2.1.8</b> Investasi langsung kepada KUPS (masyarakat desa) untuk mengimplementasikan izin perhutanan sosial untuk berkontribusi pada pengelolaan lahan hutan yang berkelanjutan.	Memastikan partisipasi perempuan dalam pengelolaan keuangan dana GCF yang ditargetkan untuk mendukung perhutanan sosial.	Persentase KUPS yang didukung, yang secara finansial dikelola oleh perempuan.	Perempuan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan KUPS masih kurang terwakili.	30% dari KUPS yang baru dibentuk yang menerima pendanaan proyek (dana GCF) memiliki perempuan sebagai bendahara mereka	Y: 1-7	Penasihat ESGI Satuan Tugas Pengarusutamaan Gender	Termasuk dalam anggaran untuk ukuran GAP #1 + Anggaran Pemantauan dan Evaluasi

Sumber daya untuk Rencana Aksi Gender sudah termasuk dalam biaya proyek secara keseluruhan.





## Referensi

- GIZ. (2020). *Analisis gender untuk program hutan dan perubahan iklim (FORCLIME 4.0)*. Jakarta: GIZ.
- ILO. (2020). Keberagaman gender di tempat kerja. Diperoleh dari: [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_753493/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_753493/lang--en/index.htm)
- Indonesian government. (1984). *CEDAW through Law Number 7 of 1984*.
- Indonesian government. (2000). *Presidential Instruction Number 9 2000 concerning Gender Mainstreaming in National Development*.
- Indonesian government. (2020). Presidential Regulation Decree Number 18 2020 concerning the National Medium Term Development Plan (RPJMN) for 2020-2024. *Sekretariat Presiden Republik Indonesia*, 1–7.
- Israel. I. (2021). Budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan (sejarah dan perkembangannya). *Jurnal Pustaka*, 5 (2), 141-150.
- Mishra, L. (2021). Dampak kekerasan terhadap perempuan pada pendidikan tinggi di Mizoram India. *Jurnal Studi Wanita Internasional*, 22 (1), 465-472 .
- KPPPA. (2022). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta: KPPPA.
- Nurhaeni, IDA (2012). *Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi (AIPD)*. Jakarta: AIPD.
- Tohirin & Zamahsari. (2021). Peran sosial laki-laki dan perempuan. *Profetika Jurnal Studi Islam*, 22 (1), 91-108.
- Wahyudi, V. (2020). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1 (1), 63-68.
- World Economic Forum. (2021). 2021 The global gender gap report. In *World Economic Forum* (Issue March). <https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021>